

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta
1996

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, mih edition, (St, paul; West, 2009),

C.S.T Kasil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Balai Pustaka, Jakarta,
1989.

H. A Masyhur Effendy, Dimensi Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan
Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta,
Konstitusi Press, 2005.

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Hasil Sidan Istimewa Tahun 1998, Jakarta : Panca Usaha, 1998

M. Budiharjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2014

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum buku
I, penerbit Alumni, Bandung, 1999.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
(Surakarta: Disertasi S2 fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), 2003.

Pemegang paten perlu perlindungan hukum, Republika, 24 Mei 2004

Philippus M Hadjon, Perlindungan Bagi rakyat Indonesia, PT.Bina Ilmu,
Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2011.

Ronny Hanijo Soemitro, *Metedeologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Saptosih Ismiati, *KDRT dan HAM (Sebuah Kajian Yuridis)*, Deepublish, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 2000

Sejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.

Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2008.

Suryadi Radjab, (et,al), *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

B. PerUndang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Universal Declaration of Human Right.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja .

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implmentasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.

C. Sumber Lainnya

Anis, Ibrahim (2010). "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Lumajang, *Jurnal Hukum Argumen*, Vol. 9, No.2.

Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin (2019). “*Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*”, Semarang, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol, 5 No. 2

R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of Financial Economics* 58 (1 Januari) 2000

Siti, Manggar F (2011). ” *Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Ham : Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 7 No. 11

Tella Fahira, Muhammad Fedryansyah, ”Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 3 No. 1 2021

The Center on Housing Rights and Evictions, 2006, *Forced Eviction; Violation of Human Rights 2003-2006*, switzerland : COHRE Internasional

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-01326430/aktivis-ham-soroti-kasus-penggusuran-tamansari> diakses pada selasa 10 nopember 2020, pukul 10.00 Wib

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/> diakses pada selasa 10 nopember 2020, pukul 10.00 Wib

[https://disdukcapil.bandung.go.id/berita-detail/begini-fakta-program-rumah-](https://disdukcapil.bandung.go.id/berita-detail/begini-fakta-program-rumah-deret-tamansari-versi-pemkot-bandung)

[deret-tamansari-versi-pemkot-bandung](https://disdukcapil.bandung.go.id/berita-detail/begini-fakta-program-rumah-deret-tamansari-versi-pemkot-bandung) diakses pada tanggal 11 Juli 2021

pukul 09:36 wib